



Penguatan Peran Widyaiswara Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Konsep *Smart ASN* 4.0

Strengthening the Role of Widyaiswara in Improving the Quality of Human Resources Towards the Smart ASN 4.0 Concept

Said Pariq

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi, Indonesia

Abstract

Widyaiswara occupied an important role in forming quality ASN including in realizing the Smart ASN 4.0 concept. Smart ASN who have the ability to master technology will push the Indonesian government system into a bureaucracy that is in line with the spirit of the industrial revolution 4.0. All types of public services can be implemented on a digital basis and integrated in such a way that public services become more optimal. Widyaiswara as one of the elements in the development of electronic-based civil servant competencies is required to have the ability to prepare needs at every stage of the training process. The training stage is the implementation of training and education and training evaluation and development. Digital competence is needed by widyaiswara to compile materials that will be used in e-learning at that stage. The role of widyaiswara must exist starting from planning, content creation and evaluation to ensure learning objectives are achieved.

Keywords: *Widyaiswara; Civil service qualification; Smart ASN 4.0; Revolusi Industry*

Abstrak

Widyaiswara menduduki peran penting dalam membentuk ASN yang berkualitas termasuk dalam mewujudkan konsep Smart ASN 4.0. *Smart* ASN yang memiliki kemampuan menguasai teknologi akan mendorong sistem pemerintahan Indonesia ke birokrasi yang sejalan dengan semangat revolusi industri 4.0. Semua jenis pelayanan publik dapat diselenggarakan berbasis digital dan terintegrasi sedemikian rupa sehingga pelayanan publik menjadi lebih optimal. Widyaiswara sebagai salah satu unsur dalam pengembangan kompetensi PNS berbasis elektronik diharuskan memiliki kemampuan untuk menyiapkan kebutuhan disetiap tahap proses pelatihan. Tahap pelatihan tersebut yaitu pelaksanaan dikjartih serta evaluasi dan pengembangan diklat. Kompetensi digital diperlukan oleh widyaiswara untuk menyusun bahan yang akan di gunakan dalam *e-learning* pada tahap tersebut. Peran widyaiswara harus ada mulai dari perencanaan, pembuatan konten dan evaluasi untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai.

Kata Kunci: Widyaiswara; Kualifikasi pegawai negeri; *Smart ASN 4.0*; Revolusi industri

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi pada era global ini menyebabkan sektor pelayanan publik menjadi aktifitas yang mendapat sorotan tajam. Tekad untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia yang mampu mengangkat derajat bangsa Indonesia sejajar dengan negara-negara di dunia perlu didukung kesiapan infrastruktur yang memadai. Sementara itu, era revolusi industri 4.0 membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi semakin pesat. Implikasinya adalah organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan mengelola pengetahuan dan teknologi informasi tersebut bila ingin tetap bertahan.

Penataan regulasi dilakukan dalam berbagai sektor, salah satunya adalah dalam bidang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dua regulasi ini menjadi landasan untuk mewujudkan aparatur birokrasi yang cerdas (*Smart ASN*) sebagai tulang punggung pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Kondisi ini menuntut ASN berkualitas yang memiliki kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural dalam mendukung

peningkatan kualitas birokrasi menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat (Nidjam, 2019).

Indonesia berada di peringkat ke-67 dari 125 negara dalam *Global Talent Competitiveness Index*, dengan nilai 38,61 pada 2019. Untuk mengejar ketertinggalan ini perlu dipersiapkan generasi *Smart ASN* yang inovatif, adaptif, dan progresif untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia. Sekretaris Deputy Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mudzakir mengungkapkan bahwa *Smart ASN* diharapkan dapat menjadi *digital talent* dan *digital leader* yang nantinya siap mendukung transformasi birokrasi digital di era revolusi industri 4.0 (Paath, 2020).

Pembaharuan yang terus dilakukan dalam penyelenggaraan pelatihan ASN menunjukkan kehendak yang kuat dari pemerintah untuk menjadikan ASN berkualitas. Dalam upaya membentuk ASN berkualitas maka lembaga pendidikan dan pelatihan di setiap kementerian dan lembaga negara mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan, dengan berbagai program peningkatan kompetensi yang didesain sesuai dengan tugas fungsi masing-masing ASN. Lembaga diklat dituntut untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang dimiliki dengan pemanfaatan teknologi

informasi secara maksimal, pemberdayaan dan pengembangan kualitas widyaiswara sebagai tenaga pengajar pada lembaga diklat serta pengembangan program pelatihan yang inovatif dan visioner (Nidjam, 2019).

Widyaiswara menduduki peran penting dalam membentuk ASN melalui berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga diklat, karena profesionalisme widyaiswara menjadi sebuah keharusan agar tidak tergerus oleh perkembangan teknologi dan informasi yang tidak terbendung. Widyaiswara sebagai tenaga pendidik, pengajar dan pelatih merupakan salah satu pilar utama dalam proses pengembangan kompetensi ASN, karena peningkatan kualitas keilmuan dan pengembangan kompetensi widyaiswara menjadi sebuah keniscayaan. Widyaiswara dituntut untuk memiliki kemampuan konseptual, analisis dan teknis, sehingga pesan atau materi kediklatan yang disampaikan tidak hanya sekedar bersifat transfer ilmu pengetahuan (*knowledge*), namun diharapkan dapat mempengaruhi pola pikir, keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) serta moralitas peserta diklat (Budyanti et al., 2020).

Nurhikmah (2020), menyebutkan bahwa kiprah widyaiswara saat ini harus selaras dan mampu mengambil peran dalam pencapaian visi misi daerah. Widyaiswara memiliki tanggung jawab bukan hanya pada

tugas pendidikan, pelatihan, tapi juga pada pengembangan sumber daya manusia terutama dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Widyaiswara adalah ASN yang diberi tugas fungsional mendidik, mengajar, dan melatih para ASN merupakan ujung tombak dalam melaksanakan pengembangan kompetensi ASN di era industri 4.0. Peran strategis ini hanya akan bisa dilaksanakan dengan baik, ketika widyaiswara mau belajar dalam mengadaptasi kemajuan teknologi untuk meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman (Saputra, 2020). Oleh karena itu, penguatan peran widyaiswara dalam menghadapi revolusi industri 4.0 mutlak diperlukan, terutama juga dalam rangka peningkatan kualitas SDM aparatur menuju konsep *Smart* ASN 4.0.

Tugas Dan Fungsi Widyaiswara

Widyaiswara berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 22 Tahun 2014 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan:

1. Mendidik, mengajar dan melatih PNS
2. Evaluasi dan Pengembangan pendidikan dan pelatihan pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah.

Tugas pokok Widyaiswara adalah dua hal

sebagaimana dalam definisi di atas. Yang dimaksud mendidik, mengajar dan melatih adalah proses belajar mengajar dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan baik secara klasikal dan/atau non klasikal. Berdasarkan Peraturan Kepala LAN RI Nomor 26 Tahun 2015 kegiatan widyaiswara yang akan dihitung angka kredit. Unsur angka kredit adalah utama dan penunjang. Kegiatan unsur utama yang dilaksanakan adalah mengikuti pendidikan dan pelatihan, melaksanakan dikjartih ASN dan Non ASN, Evaluasi dan Pengembangan diklat, Pengembangan Profesi.

Pelaksanaan tugas Widyaiswara disesuaikan dengan spesialisasi berdasarkan pada rumpun keilmuan tertentu sesuai latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman kerja. Hal ini harus didukung dengan kompetensi yang sesuai dengan bidang spesialisasi. Kompetensi widyaiswara adalah pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Kompetensi yang dituntut oleh Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah pengelolaan pembelajaran, substansi, kepribadian, dan sosial.

Standar kompetensi widyaiswara berdasarkan Perkaln Nomor 5 Tahun 2008 adalah kemampuan minimal yang secara umum dimiliki dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk

mendidik, mengajar dan melatih Pegawai Negeri Sipil. Standar kompetensi Widyaiswara ada empat yaitu kompetensi:

- a. Pengelolaan pembelajaran adalah kemampuan merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran
- b. Kepribadian adalah kemampuan terkait tingkah laku dalam melaksanakan tugas jabatan sehingga dapat diamati dan dijadikan teladan bagi peserta pendidikan dan pelatihan
- c. Sosial adalah kemampuan untuk membangun hubungan dengan lingkungan kerjanya
- d. Substantif adalah kemampuan terkait bidang keilmuan dan keterampilan dalam mata Diklat yang diajarkan.

Berdasarkan Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2015 tugas yang dapat dilaksanakan widyaiswara adalah:

- a. Pelaksanaan mendidik, mengajar dan melatih
 - 1) Persiapan
 - a) Menyusun Bahan Pendidikan dan Pelatihan (Bahan Tayang, Bahan Ajar, Bahan Peraga serta GBPP/RBPMd dan SAP/RP)
 - b) Menyusun Soal/Materi Ujian Pendidikan dan pelatihan

- 2) Pelaksanaan
 - a) Tatap Muka Pendidikan dan Pelatihan (PNS)
 - b) Tatap Muka Pendidikan dan Pelatihan t (Non ASN)
 - c) Pembimbingan
 - d) Pendampingan Orientasi Lapangan/ PKL/ *Benchmarking*
 - e) Pendampingan Proyek Perubahan/ Penulisan Kertas Kerja
 - f) Memeriksa Hasil Ujian Pendidikan dan pelatihan
 - g) Coaching Proses Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan
- b. Evaluasi Dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
 - 1) Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan
 - a) Terlibat dalam evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di instansi
 - b) terlibat dalam evaluasi kinerja widyaiswara
 - 2) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
 - a) Terlibat Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan
 - b) Terlibat Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
 - c) Terlibat Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
- c. Pengembangan Profesi
 - 1) Membuat Karya Ilmiah/ Karya Tulis sesuai Spesialisasi Keahliannya dan

Lingkup Pendidikan dan pelatihan dalam bentuk buku, non buku dan makalah dalam pertemuan ilmiah

- 2) Penemuan Inovasi Yang Dipatenkan dan Telah Masuk Daftar Paten Sesuai Bidang Spesialisasi Keahliannya
- 3) Penyusunan Buku Pedoman/ Ketentuan Pelaksanaan/ Ketentuan Teknis Di Bidang Kediklatan
- 4) Pelaksanaan Orasi Ilmiah sesuai spesialisasinya.

Revolusi Industri Dan Transformasi Digital Dalam Pelayanan Publik

Era revolusi industri 4.0 telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan termasuk metode atau prosedur orang dalam menyelesaikan pekerjaan. Personel yang bekerja atau beraktivitas tidak bisa hanya mengandalkan penguasaan pokok keahliannya saja tetapi juga penguasaan ilmu komunikasi dan teknologi informasi karena sarana prasarana dalam sistem manajemen organisasi dan proses produksi berbasis *cyber*. Dalam revolusi industri 4.0 ini, digitalisasi menjadi hal yang mutlak dilakukan, termasuk di bidang pelayanan publik. Digitalisasi dalam pelayanan publik, diharapkan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Dengan adanya kemudahan pelayanan, diharapkan juga dapat mengubah stigma ketidakpercayaan masyarakat atas pelayanan

buruk pemerintah dapat menghilang (Kementerian PANRB, 2019b).

Revolusi industri 4.0 ditopang setidaknya dengan 9 (sembilan) pilar yang menjadi ciri perkembangan teknologi digital pada era ini. Sembilan pilar tersebut adalah:

- a. Analisis Big Data yaitu kemampuan mengolah data dalam jumlah yang besar baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur
- b. Robot Otonom yaitu penggunaan teknologi secara otomatis dalam mengatur berbagai kebutuhan sebagaimana robot.
- c. Teknologi Simulasi yaitu simulasi proses pekerjaan dari waktu ke waktu untuk memastikan proses kerja sesuai dengan kebutuhan.
- d. Integrasi Sistem Horizontal dan Vertikal yaitu integrasi antar sub sistem agar dapat berjalan sesuai dengan fungsi.
- e. Industri Berbasis *Internet of Things* (IoT) yaitu kemampuan teknologi untuk mentransfer data baik melalui jaringan maupun tidak tanpa campur tangan manusia.
- f. Keamanan Siber yaitu perlindungan terhadap data dari serangan.
- g. Teknologi Informasi berbasis *Cloud* yaitu pusat pengolahan data berbasis internet dengan memberikan hak akses pada pengguna sesuai dengan kewenangannya.

h. Manufaktur Aditif yaitu penambahan komponen tertentu dalam produksi sehingga dapat menampilkan hasil produksi secara riil dalam bentuk 3D

i. Teknologi *Augmented Reality* yaitu penggabungan teknologi secara *riil time* dengan dunia nyata (Ashari & Sancoko, 2021).

Revolusi Industri 4.0 dengan perkembangan teknologi digital tidak hanya membawa perubahan signifikan dalam proses produksi di dunia industri tetapi di semua aspek kehidupan termasuk layanan publik oleh pemerintah. Era industri 4.0 menciptakan aktivitas perekonomian dan layanan lainnya berbasis inovasi dengan *backbound* utama pengetahuan, data dan IoT (Morrar et al., 2017).

Teknologi digital meningkatkan optimalisasi waktu dan biaya dalam menghasilkan produk barang atau jasa. Di sektor publik, hal ini berpengaruh pada tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih cepat dan tepat. Tuntutan ini yang mengharuskan pemerintah melakukan transformasi layanan dari basis manual menjadi layanan berbasis digital. Dalam era Revolusi Industri 4.0 pemerintah beserta jajaran birokrasi harus dapat beradaptasi dengan sistem yang berkembang di era industri 4.0 agar bisa bertahan dan mendapatkan kepercayaan publik (Schwab, 2016).

Langkah digitalisasi layanan publik dilakukan dengan *e-government* sebagai jawaban untuk adaptasi di era industri 4.0. *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dalam menjalankan layanan publik (Rokhman, 2011). Dengan adanya *e-government* membuat sistem layanan pemerintahan lebih meningkatkan tingkat aksesibilitas dan partisipasi masyarakat. Dengan *e-government*, pemerintah mampu melayani pemangku kepentingan secara digital, warga secara lebih efektif berperan dalam efisiensi layanan publik. (Isagah & Wimmer, 2017). Pemerintah bersungguh-sungguh dalam program *e-government* dengan diterbitkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003.

Menurut Indrajit, (2006), implementasi *e-government* diantaranya:

- a. Pemerintah kepada masyarakat (G2C) yaitu bagaimana pemerintah memberikan layanan dasar dan penyampain informasi kepada masyarakat;
- b. Pemerintah kepada komunitas bisnis (G2B) yaitu bagaimana pemerintah menjalin hubungan dengan komunitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk perizinan usaha, perpajakan dan lain sebagainya;
- c. Pemerintah kepada pegawai (G2E) yaitu bentuk layanan pemerintah kepada pegawai pemerintah;
- d. Pemerintah kepada pemerintah lain (G2G) yaitu bagaimana hubungan antar

tingkat pemerintahan serta antar pemerintah dengan negara lain dalam hubungan internasional.

Peningkatan Kompetensi ASN Menuju Konsep *Smart* ASN 4.0

Persaingan global saat ini masuk dalam ranah digital, termasuk pada sistem pemerintahan. Indonesia, mau tidak mau, juga ikut dalam arus revolusi industri 4.0 tersebut. Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dipaksa untuk adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Digitalisasi birokrasi untuk pelayanan yang optimal, adalah hal yang tak bisa disanggah. Deputy bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pemerintah memiliki program yang dinamakan 6P, yang masuk dalam Human Capital Management Strategy. Program 6P itu melingkupi perencanaan; perekrutan dan seleksi; pengembangan kapasitas; penilaian kinerja dan penghargaan; promosi, rotasi, dan karier; serta peningkatan kesejahteraan. Program ini merupakan strategi mempersiapkan talenta ASN menghadapi era digital (Kementerian PANRB, 2019a).

Smart ASN merupakan aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, *hospitality*, *networking*, teknologi informasi, bahasa asing dan *entrepreneurship* yang berperan sebagai

digital talent dan *digital leader* yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia (Faedlulloh et al., 2020). *Smart ASN* merupakan salah satu kunci sukses tata kelola birokrasi dan sistem pemerintahan dengan menggunakan nilai efektivitas, efesiensi, *equity*, dan ekonomis (Kemenkes RI, 2020). Melalui upaya tersebut, tujuan reformasi birokrasi menjadi birokrasi berkelas dunia dapat terwujud.

Dalam agenda reformasi birokrasi di Indonesia, *Smart ASN* ditargetkan bisa tercapai pada tahun 2024. Tercapainya *Smart ASN* 2024 juga sejalan dengan terbentuknya nilai Apartur Sipil Negara 2024, yakni 1) Beretika, 2) Berpikir strategis, 3) Berkolaborasi, 4) Berkeputusan tegas, 5) Berinovasi, dan 6) Bekerja tuntas (Faedlulloh et al., 2020). Untuk merealisasikan *Smart ASN*, Kemenpan RB telah memiliki strategi 6P, yakni 1) Perencanaan, 2) Perekrutan dan seleksi, 3) Pengembangan kapasitas, 4) Penilaian kinerja dan penghargaan, 5) Promosi, rotasi dan karir, dan 6) Peningkatan kesejahteraan. Strategi tersebut saling berkelindan satu sama lain dan memiliki urgensi yang sama.

Era digital seperti saat ini menuntut kapasitas dalam pemanfaatan peluang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam menghadapi tantangan revolusi

industri 4.0. *Smart ASN* yang memiliki kemampuan menguasai teknologi akan mendorong sistem pemerintahan Indonesia ke birokrasi yang sejalan dengan semangat revolusi industri 4.0. Semua jenis pelayanan publik dapat diselenggarakan berbasis digital dan terintegrasi sedemikian rupa sehingga pelayanan publik menjadi lebih optimal. Secara spesifik, ASN milenial yang akrab dengan teknologi harus mengambil posisi yang selalu haus akan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan di mana pun, kapan pun, dan situasi apapun (Kementerian PANRB, 2020).

Smart ASN hadir dalam membawa perubahan birokrasi Pemerintah Indonesia di Era digital. Mengacu pada *Digital Competency Framework*, generasi *smart ASN* dituntut untuk mampu memenuhi standar penggunaan *Information and Communication Technology* (ICT) menyangkut pengetahuan, sikap, serta keterampilan guna mencapai RPJMN ketiga dalam RPJPN 2005-2025 yaitu mewujudkan *Smart ASN* berwawasan global, mampu menguasai teknologi informasi, bahasa asing, dan jejaring kerja (*networking*), dan peningkatan integritas (Azzahra, 2020). Adapun program yang telah diberlakukan Pemerintah guna mempersiapkan *smart ASN*, diantaranya:

- 1) Pengadaan beasiswa S2 dan S3 terkait dengan pengembangan teknologi informasi dan digital seperti di India dan China,
- 2) *Digital talent scholarship*, yaitu program beasiswa untuk 25 ribu generasi milenial sekaligus pemberian materi kompetensi internasional yang didukung oleh perusahaan besar seperti: Microsoft, Google, dan Sessco,
- 3) Pemberian *Training of Trainers (ToT)* kepada dosen yang memberikan materi di *Digital Talent Scholarship* dengan melakukan kerjasama lebih dari 30 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk memberikan materi terkait big data, *artificial intelligence system*, *cyber security* hingga *digital business* (Azzahra, 2020).

Peran Widyaiswara Mewujudkan Konsep Smart ASN 4.0

Hasil Kongres Nasional ke-VI Widyaiswara ditandaskan tentang peran widyaiswara sebagai mitra utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan pengembangan SDM aparatur yang hanya dapat terlaksana jika widyaiswara memiliki dedikasi dan produktifitas (mengajar) yang berkualitas (Rahmawati & Arifin, 2021). Widyaiswara dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia berperan sebagai (Triati, 2019):

- 1) Seseorang yang membantu dan mengarahkan peserta pelatihan untuk memahami tentang materi atau topik yang sedang dipelajari;
- 2) Pendorong dan penggerak;
- 3) Pemberi inspirasi;
- 4) Memperkenalkan sebuah gagasan, ide, ataupun cara yang masih relatif baru;
- 5) *Scientist*; dan
- 6) Seorang yang mampu memberikan masukan dan nasihat.

Sasaran pengembangan untuk meningkatkan kompetensi widyaiswara melalui pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas yang sedang dihadapi dan ada pula sasaran pengembangan yang dinamis sifatnya yaitu untuk mengantisipasi tuntutan tugas yang lebih kompleks. Konsep dasar pengembangan widyaiswara dibedakan kepada dua bentuk yaitu:

- 1) Pengembangan dengan siklus yang statis merupakan program pengembangan yang bertujuan agar widyaiswara memperoleh kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang sedang dihadapinya secara optimal; dan
- 2) Pengembangan dengan model siklus yang dinamis dimana model pengembangan ini mengacu pada tugas baru yang akan dihadapi yang menuntut agar widyaiswara menguasai seperangkat keahlian baru pula sehingga kinerjanya

sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan standar kinerja yang ada.

Dalam hubungan dengan pengembangan kualitas aparatur menuju konsep *Smart ASN* 4.0, menurut Sartiyono (2020), widyaiswara perlu mengadakan perubahan sebagai berikut:

- a. Perubahan *Mind-set* oleh pengajar/ widyaiswara dari *Fix Mind-set* menjadi *Growth Mind-set* secara suka rela dari dirinya sendiri dengan diberikan sentuhan berupa tantangan dari instansi Pembina.
- b. Profesionalisme pengajar/ widyaiswara harus ditingkatkan secara cepat, berinovasi dan kreatifitas yang tinggi secara pribadi, belajar mandiri dan berkelompok kecil dari fasilitas perkembangan teknologi 4.0 melalui internet, tanpa mengharapakan dukungan dari instansi Pembina.
- c. Pengajar/widyaiswara ikut melibatkan diri dalam penyusunan kurikulum pelatihan kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan di era digital saat ini yang tidak hanya berbasis kompetensi, namun pengembangan lainnya menuju ASN yang smart, dengan mengembangkan pembelajaran *e-learning*, *blended learning*, *coaching*, *mentoring* dan *konseling*.

Widyaiswara sebagai salah satu unsur dalam pengembangan kompetensi PNS berbasis elektronik diharuskan memiliki

kemampuan untuk menyiapkan kebutuhan disetiap tahap proses pelatihan. Tahap pelatihan tersebut yaitu pelaksanaan dikjartih serta evaluasi dan pengembangan diklat. Kompetensi digital diperlukan oleh widyaiswara untuk menyusun bahan yang akan di gunakan dalam *e-learning* pada tahap tersebut (Ashari & Sancoko, 2021).

Widyaisawara dalam melaksanakan tugas sangat terkait dengan kualitas informasi. Hal ini dilakukan di setiap tahap pelaksanaan tugas seperti evaluasi dan pengembangan diklat, pelaksanaan dikjartih dan pengembangan profesi. Kurikulum pelatihan, modul, GBPP/ SAP, bahan tayang, bahan ajar, proses tatap muka baik klasikal maupun daring, soal yang digunakan evaluasi pelatihan disusun berbasis teknologi digital. Bahan-bahan pembelajaran harus bisa memenuhi kebutuhan belajar dimana saja dan kapan saja. Peran widyaiswara harus ada mulai dari perencanaan, pembuatan konten dan evaluasi untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai (Ashari & Sancoko, 2021).

1. Informasi dan literasi data

Widyaiswara dalam menyusun kurikulum, modul, GBPP/SAP, bahan tayang, bahan ajar, serta evaluasi pembelajaran memerlukan data dan informasi yang memadai. Hal ini yang dikenal dengan istilah literasi digital.

Literasi Digital adalah proses penggunaan alat dan fasilitas digital yang didasarkan kesadaran, sikap, dan kemampuan individu yang digunakan untuk identifikasi, akses, mengelola, integrasi, evaluasi, analisis, sintesis segala sumber daya digital, membangun pengetahuan baru, menciptakan ekspresi media, dan membangun komunikasi dengan orang lain dalam konteks situasi kehidupan tertentu dalam rangka tindakan sosial yang konstruktif. Untuk bisa memenuhi kebutuhan kompetensi ini, widyaiswara bisa mendapatkan dengan cara digital dengan mudah dan hemat. Kebutuhan sumber literatur bisa di peroleh dengan menjadi anggota perpustakaan nasional secara online. Fasilitas yang diperoleh adalah akses ke jurnal-jurnal secara gratis. Kebutuhan data sekunder bisa diperoleh diberbagai lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah misalnya BPS (Ashari & Sancoko, 2021).

2. Komunikasi dan kolaborasi

Widyaiswara dalam berinteraksi di era digital berbeda dengan era sebelumnya. Proses pekerjaan dilaksanakan secara digital, mulai dari rapat, diskusi, kegiatan belajar mengajar sampai dengan evaluasi pembelajaran. Widyaiswara harus mampu berkomunikasi baik berbentuk tulisan melalui aplikasi pesan maupun

audio visual melalui aplikasi yang mendukung percakapan dengan banyak pengguna. Kolaborasi dengan orang lain diperlukan untuk menghasilkan output yang baik, kemamuan berbagi data melalui teknologi digital baik melalui email maupun media penyimpanan online. Dalam komunikasi, widyaiswara harus mengetahui norma dan etika komunikasi di era digital dan media sosial. Kesalahan komunikasi akan merugikan tidak hanya pribadi widyaiswara akan tetapi institusi kementerian/lembaga juga akan dirugikan. Untuk itu widyaiswara harus mampu mengelola keamanan identitas digital seperti akun dan password (Ashari & Sancoko, 2021).

3. Kemampuan menciptakan konten digital, Konten digital menentukan kualitas pembelajaran di era digital. Konten digital dapat dipergunakan untuk kebutuhan organisasi dan juga individu. Untuk kebutuhan organisasi, widyaiswara harus ikut berkolaborasi dalam tim pengembangan konten digital. Tugas yang paling mendasar adalah menyiapkan substansi pembelajaran sesuai dengan keahlian. Peran minimal yang haru dilakukan widyaiswara adalah melakukan supervisi terhadap substansi materi mulai dari tahap perencanaan, produksi, editing sampai publikasi. Untuk kebutuhan individu, widyaiswara bisa membuat

channel, forum, grup, blog dan lain-lain yang dikelola secara personal. widyaiswara dapat membentuk tim atau dikerjakan sendiri dalam pembuatan konten. Konten dapat diproduksi dengan aplikasi yang telah digunakan sebelumnya dengan aplikasi tambahan yang bisa didapatkan secara gratis di internet. Diantara aplikasi yang bisa digunakan untuk pembuatan konten berupa video yaitu *powerpoint* dan *camtasia*. Selain itu, widyaiswara harus mempelajari dengan detil batasan penggunaan hasil karya orang lain agar tidak melanggar hak cipta dan lisensi. Pelanggaran atas hak cipta dan lisensi dapat berakibat tuntutan hukum (Ashari & Sancoko, 2021).

4. Keamanan

Dalam bekerja, widyaiswara menggunakan alat pengolah data berupa handphone, notebook, komputer dan sebagainya baik milik pribadi maupun barang milik negara. Dalam penggunaanya harus memperhatikan aspek keamanan baik hardware maupun software. Penipuan dengan modus pembajakan nomor HP yang digunakan di media sosial, akun media sosial dan sebagainya perlu menjadi perhatian. Widyaiswara harus mempunyai kompetensi untuk menjaga keamanan peralatan kerjanya. Penggunaan password

dan PIN harus dilakukan secara bijak. Hal ini penting terkait dengan jenis data-data yang disimpan di perangkat digital. Terkait dengan kompetensi ini, widyaisawara juga harus melindungi lingkungan/ proses belajar dari hal-hal yang mengganggu, misalnya tingkat kebisingan (Ashari & Sancoko, 2021).

5. Kemampuan memecahkan dan mengatasi persoalan secara teknis

Kendala-kendala dalam penggunaan perangkat digital harus diantisipasi. Permasalahan lupa *password*, laptop tiba-tiba mati, LCD yang bermasalah, suara yang tidak terdengar dan sebagainya kadang terjadi pada saat widyaiswara bekerja. widyaiswara harus mampu menyelesaikan permasalahan yang dasar pada perangkat digital yang dipergunakan (Ashari & Sancoko, 2021).

KESIMPULAN dan SARAN

Transformasi digital dalam pelayanan publik mutlak dilaksanakan sesuai dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Hal ini juga dilakukan demi adanya kemudahan pelayanan bagi masyarakat dan mengubah stigma ketidakpercayaan masyarakat atas pelayanan buruk pemerintah. Untuk mewujudkan digitalisasi pelayanan publik tentunya perlu didukung oleh kompetensi ASN yang berkualitas yang mampu

menggunakan teknologi informasi dengan baik.

Smart ASN hadir dalam membawa perubahan birokrasi Pemerintah Indonesia di Era digital. Generasi *smart ASN* dituntut untuk mampu memenuhi standar penggunaan *Information and Communication Technology (ICT)* menyangkut pengetahuan, sikap, serta keterampilan guna mewujudkan *Smart ASN* berwawasan global, mampu menguasai teknologi informasi, bahasa asing, dan jejaring kerja (*networking*), dan peningkatan integritas. *Smart ASN* yang memiliki kemampuan menguasai teknologi akan mendorong sistem pemerintahan Indonesia ke birokrasi yang sejalan dengan semangat revolusi industri 4.0. Semua jenis pelayanan publik dapat diselenggarakan berbasis digital dan terintegrasi sedemikian rupa sehingga pelayanan publik menjadi lebih optimal.

Widyaiswara sebagai salah satu unsur dalam pengembangan kompetensi PNS berbasis elektronik diharuskan memiliki kemampuan untuk menyiapkan kebutuhan disetiap tahap proses pelatihan. Tahap pelatihan tersebut yaitu pelaksanaan dikjartih serta evaluasi dan pengembangan diklat. Kompetensi digital diperlukan oleh widyaiswara untuk menyusun bahan yang akan di gunakan dalam *e-learning* pada tahap tersebut.

Peran widyaiswara harus ada mulai dari perencanaan, pembuatan konten dan evaluasi untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, H., & Sancoko, B. (2021). Kompetensi Widyaiswara di Era Digital dan Media Sosial. *PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi ...*, 7(1), 11–30.
<https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/pinus/article/view/15970>
- Azzahra, S. (2020). *Meninjau Smart ASN sebagai Solusi Birokrasi Era Digital*. Yoursay.Id.
- Bailah, B. ., & Bambang Niko Pasla. (2020). Basic Training Group III Patterns in the Network (Online): Perceptions of Participant Satisfaction and Learning Outcomes. *Jurnal Prajaiswara*, 1(2), 125–139.
<https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v1i2.10>
- Faedlulloh, D., Maarif, S., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2020). Indonesia Bureaucracy and Industrial Revolution 4 . 0 : Preventing the Myth of *Smart Asn* in Indonesia ' S Bureaucratic Reform Agenda. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3), 313–336.
- Fianita Dhany. (2020). The Effectiveness of Virtual State Defense Preparedness Learning during the Covid-19 Pandemic in Increasing the Nationalism of State Civil Apparatus (ASN) in Basic Education for CPNS Group III Batch 2 in Tanjabbar Regency in 2020. *Jurnal Prajaiswara*, 1(2), 140–152.
<https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v1i2.11>
- Kemenkes RI. (2020). *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Kemenkes RI.
<https://www.depkes.go.id/article/view/18030500005/waspadai-peningkatan-penyakitmenular.html%0Ahttp://www.depkes.go.id/article/view/1707070000>
- 4/program-indonesia-sehat-dengan-pendekatan-keluarga.html
- Kementerian PANRB. (2019a). *Menciptakan Smart ASN Menuju Birokrasi 4.0*.
<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menciptakan-smart-asn-menuju-birokrasi-4-0>
- Kementerian PANRB. (2019b, April 10). *Digitalisasi Pelayanan Publik, Ubah Stigma Masyarakat*.
<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/digitalisasi-pelayanan-publik-ubah-stigma-masyarakat>
- Kementerian PANRB. (2020). *Smart ASN Menguasai Era Digital*.
- Lailatul Isnaini. (2021). Evaluation of Online Learning for the Public Ethics Training Course for CPNS Batch I, Tanjung Jabung Barat Regency 2020. *Jurnal Prajaiswara*, 2(1), 1–14.
<https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v2i1.15>
- Morrar, R., Arman, H., & Mousa, S. (2017). The Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) a Social Innovation Perspective. *Technology Innovation Management Review*, 7(11), 12–21.
<https://doi.org/10.25073/0866-773x/97>
- Nidjam, A. (2019). Widyaiswara Akselerator Reformasi Birokrasi. In *Litbangdiklat Press*.
<https://id.id1lib.org/book/15838605/5b63dc/?wrongHash>
- Nurhikmah. (2020). Peran Widyaiswara dalam Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Corporate University. In Arisman, Nurhidayat, & Madona (Eds.), *e-Proceeding Seminar Nasional Pengembangan Kompetensi SDM 'Peran Corporate University*

- dalam *Pengembangan Kompetensi SDM Berdaya Saing Global*' (pp. 55–60). Pusdiklat BMKG.
- PASLA, B. N. (2009). *Pengaruh inteligensi emosional terhadap organizational citizenship behavior dengan kohesivitas sebagai pemediasi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Rahmawati, D. R., & Arifin, I. (2021). Peran Widyaiswara dalam Pelaksanaan Pendidikan di Era Society 5 . 0. *Prosiding Simposium Nasional APMAPI, ISMAPI, FIP UM 2021*, 39–42.
- Rina Widiasih. (2020). Online Learning Resource Management in CPNS Basic Training. *Jurnal Prajaiswara*, 1(2), 182–197.
<https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v1i2.14>
- Susilawati N, & Bambang Niko Pasla. (2020). Application of Pancasila as the Ethical System of the Indonesian Nation. *Jurnal Prajaiswara*, 1(1), 20–28.
<https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v1i1.2>
- Saputra, U. N. (2020). Tantangan Widyaiswara di Era Industri 4.0. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 01, 23–29.
- Sartiyono, T. (2020). Terobosan Dalam Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara Untuk Menjadikan ASN Berdaya Saing Global. In *Karya Tulis Tematik*.
- Sari, D. C., Setiawan, A., Shiozaki, Y., Rajab, K., Yasid, A., Sham, F. M., ... & Puspitorini, P. S. (2021). The Internationalization Dynamics of Character Based Education Pandemic. *Tamansiswa International Journal in Education and Science*, 3(1), 1-8.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond*. Global Agenda.
<https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/>
- Triati, E. (2019). Optimalisasi Peran Widyaiswara dalam Pelaksanaan Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan. *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 14(1), 42–50.